

Wisatawan Asing Tak Pakai Helm Bentak-Bentak Kasat Lantas Gianyar

GIANYAR (IM) – Wisatawan asing di Bali semakin kurang ajar saja. Mereka seperti tak peduli hukum yang berlaku di Indonesia, seperti yang diperlihatkan wisatawan asing ini yang membentak polisi saat dihentikan karena tidak mengenakan helm saat razia, di Jalan Catus Pata Ubud.

Wisatawan tersebut bahkan berani melawan Kasat Lantas Polres Gianyar, AKP Muhammad Bhayangkara Putra Sejati.

Bahkan aksi WNA yang berani melawan petugas saat dihentikan karena melanggar lalu lintas membuat warga di sekitar lokasi geram. Namun, petugas dari Satuan Lantas Polres Gianyar terlihat berusaha meminta WNA tersebut mungkir diperiksa surat-surat kendaraannya.

Setelah cukup lama berdebat, akhirnya WNA tersebut menunjukkan surat-surat kendaraannya.

Saat dikonfirmasi, Kamis (16/3), Kasat Lantas Polres Gianyar, AKP Muhammad Bhayangkara Putra Sejati membenarkan pihaknya sempat memberhentikan WNA karena tidak memakai helm saat razia kendaraan di kawasan Catus Pata Ubud.

Ia menyebut WNA tersebut bisa menunjukkan surat-surat kendaraan dan selanjutnya diberikan teguran. • lus



FOTO: ANTARA

PENGAMANAN SIDANG VONIS PERKARA TRAGEDI STADION KANJURUHAN

Personel Brimob mengikuti apel pasukan pengamanan sidang vonis perkara tragedi Stadion Kanjuruhan di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur, Kamis (16/3). Polrestabes Surabaya menerjunkan 254 personel untuk mengamankan jalannya sidang vonis dengan terdakwa mantan Danki 1 Brimob Polda Jatim AKP Hasdarmawan, mantan Kabag Ops Polres Malang Kompol Wahyu Setyo Pranoto dan mantan Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Achmadi.

APA Tak Terima Disebut sebagai Pembisik Mario Dandy hingga Aniaya David Ozora

JAKARTA (IM) - Anastasia Pretya Amanda (APA), yang selama ini disebut-sebut sebagai pembisik Mario Dandy, tersangka penganiayaan terhadap David Ozora, akhirnya muncul di hadapan publik.

APA muncul untuk melaporkan Mario Dandy ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik. Selain itu, Amanda tidak terima dikaitkan dengan kasus Mario Dandy itu.

"Kami mau menjelaskan yang sudah pernah diklarifikasikan, mengenai keterkaitan yang ditunjukkan kepada Amanda," kata kuasa hukum Amanda, Enyta Edyalaksmita kepada wartawan, Kamis (16/3).

Amanda tidak terima lantaran disebut sebagai provokator atau pembisik ke Mario Dandy atas perbuatan tidak baik yang diduga dilakukan David kepada AG. Amanda mengklaim dirinya tidak mengenal sosok AG yang merupakan pacar dari Mario Dandy.

"Jadi pernyataan klarifikasi kami adalah dengan tegas, satu bahwa Amanda tidak pernah kenal dengan AG, tidak pernah ada kenal sama sekali," ujarnya.

Dijelaskan Ernita, bahwa hubungan Mario Dandy dengan kliennya itu sudah berakhir pada 2022 silam. Namun, pada 2023, Mario Dandy menemui Amanda yang saat itu sedang nongkrong bersama teman-temannya di sebuah cafe.

"Di tanggal 30 Januari, itu Amanda sedang berkumpul dengan teman-temannya di sebuah kafe di Kemang, lagi hang out sama teman-temannya di sana. Saudara MDS ini datang menemui, terjadilah percakapan," ucapnya.

Kemudian Amanda, kata Ernita merasa keberatan dengan kehadiran Mario Dandy. Sebab, kondisinya saat itu Amanda sedang bersama teman-temannya.

"Sebenarnya terus terang saja Amanda keberatan untuk ditemui karena lagi hang out sama teman-teman. Tentu

Kasat Lantas Polres Gianyar AKP Muhammad Bhayangkara Putra Sejati.

Bahkan aksi WNA yang berani melawan petugas saat dihentikan karena melanggar lalu lintas membuat warga di sekitar lokasi geram. Namun, petugas dari Satuan Lantas Polres Gianyar terlihat berusaha meminta WNA tersebut mungkir diperiksa surat-surat kendaraannya.

Setelah cukup lama berdebat, akhirnya WNA tersebut menunjukkan surat-surat kendaraannya.

Saat dikonfirmasi, Kamis (16/3), Kasat Lantas Polres Gianyar, AKP Muhammad Bhayangkara Putra Sejati membenarkan pihaknya sempat memberhentikan WNA karena tidak memakai helm saat razia kendaraan di kawasan Catus Pata Ubud.

Ia menyebut WNA tersebut bisa menunjukkan surat-surat kendaraan dan selanjutnya diberikan teguran. • lus

12 | PoliceLine

FOTO: ANTARA



PENANGKAPAN DAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOBA

Wagub Riau Edy Natar Nasution (kanan) disaksikan Waka Polda Riau Brigjen Pol Rahmadi (kedua kiri) memasukan sabu-sabu ke dalam wadah pemusnah ketika menggelar konferensi pers penangkapan dan pemusnahan barang bukti tangkapan hasil Operasi Antik Lancang Kuning 2023 di Mapolda Riau, di Pekanbaru, Riau, Kamis (16/3). Dalam Operasi Antik Lancang Kuning 2023 Polda Riau berhasil mengamankan 65 kg narkoba jenis sabu-sabu serta 554.520 butir pil ekstasi dan memusnahkan sebanyak 22 kg sabu-sabu hasil tangkapan dari Polresta Pekanbaru.

Kapolri Jenderal Listyo Minta Bareskrim Membentuk Satgas Anti Politik Uang

Tugas Polri adalah mengawal semua program pemerintah, mengamankan agenda nasional maupun internasional, hingga proses penegakan hukum.

JAKARTA (IM) - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta jajaran Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti-Money Politik. Pembentukan Satgas anti Politik Uang demi menciptakan pemilihan umum (pemilu) yang demokratis pada tahun 2024 mendatang.

Pada saat yang sama, Kapolri juga menekankan agar Bareskrim Polri harus berperan aktif di dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sejak dini.

"Rekan-rekan harus ikuti, awasi sebaik-baiknya dari awal

pemetaan dan kerjasama dari gakkumdu dan bentuk satgas anti-money politik untuk menciptakan Pemilu yang lebih demokratis dan tentunya kita bisa tahu apa yang terjadi di lapangan," kata Listyo saat memberikan arahan dalam kegiatan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Bareskrim di Bandung, Jawa Barat, Rabu (15/3) kemarin, dikutip dari keterangan tertulis.

Bahkan, Kapolri Listyo menekankan, jika diperlukan agar dibentuk suatu sistem aplikasi pengaduan bersama terkait dengan Pemilu 2024. Hal itu dimaksudkan agar dapat

diketahui apa yang sebenarnya terjadi di lapangan, khususnya di wilayah yang rawan versi Bawaslu maupun Polri.

Kapolri telah menginstruksikan Bareskrim khususnya Direktorat Tindak Pidana Siber untuk melakukan pemantauan serta pengawasan di dunia maya guna menciptakan Pemilu 2024 yang aman dan damai. Apalagi dinamika isu di media sosial (medsos) terkadang dapat berdampak di dunia nyata.

Maka itu, ia berharap Bareskrim melakukan pemetaan dengan baik, sehingga dapat mengetahui langkah yang harus dilakukan.

"Melakukan cooling system, take down bila diperlukan, kerja sama dengan Kominfo. Kemudian lakukan penegakan hukum pada waktunya, kalau memang itu kita anggap berbahaya, rawan, sifatnya

SARA dan memecah belah persatuan-kesatuan. Kita harus ambil langkah tegas. Kita betul-betul bisa mapping dengan baik," katanya.

Tak hanya itu, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri juga diminta berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polri serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terkait sistem informasi Pemilu.

Tak hanya terkait pemilu, Listyo juga memberikan arahan terkait sejumlah isu lainnya, termasuk soal penanganan kejahatan investasi dan keuangan yang belakangan marak terjadi. Ia meminta agar jajaran Bareskrim tidak ragu untuk mengusut tuntas dan menindak tegas terkait kejahatan investasi dan keuangan.

"Lebih baik kita proses tegas, kita bisa sebanyak-banyaknya kita serahkan ke pengadilan diputus supaya bisa dikembalikan ke korban itu jauh lebih baik. Karena jumlah korban besar, kerugian besar. Jadi ini adalah saatnya rekan-rekan untuk munculkan ini untuk mengembalikan kepercayaan publik," ujar mantan Kapolda Banten itu.

Isu lain yang ditekannya adalah soal tugas Polri dalam mengawal seluruh program kebijakan pemerintah, mengamankan agenda nasional maupun internasional, hingga proses penegakan hukum.

Jajaran reserse Polri juga harus memiliki kesiapan untuk menghadapi situasi dan dinamika baik di dalam maupun luar negeri yang dewasa ini penuh ketidakpastian ataupun dapat berubah setiap saat.

Selain itu, Listyo mengingatkan jajaran untuk mengawal berbagai macam kebijakan dan kegiatan nasional maupun internasional.

"Salah satu yang paling dekat adalah kejuaraan Piala Dunia U-20. Dan juga ASEAN Summit dilaksanakan di Labuan Bajo tentu ini memerlukan pengamanan ekstra. Sehingga kemudian pada saat KTT G-20 kemarin kita bisa melaksanakan pengamanan dengan baik, di Labuan Bajo kita harus bisa lakukan hal yang sama," ujarnya.

Listyo mengingatkan jajaran Bareskrim Polri agar mempertahankan ketersediaan serta mengendalikan harga pangan melalui Satgas Pangan. Mengingat, sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadhan dan Hari Raya Lebaran.

Dalam kesempatan itu, Listyo menyampaikan beberapa penekanan kepada jajaran Bareskrim Polri dalam rangka menjalankan tugasnya dengan baik dalam setiap penanganan kejahatan, di antaranya di bidang pertambangan, kebakaran hutan dan lahan, kejahatan konvensional, hingga kejahatan terhadap perempuan dan anak. • lus

Polri Mulai Matangkan Pengamanan Sekitar 123 Juta Pemudik Lebaran 2023

JAKARTA (IM) - Jelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memprediksi sekitar 123 juta warga bakal melakukan tradisi mudik saat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah.

Kakorlantas Polri Irijen Pol Firman Santyabudi memastikan bahwa pihaknya akan segera memantapkan kesiapan rekayasa lalu lintas untuk mudik Lebaran 2023.

"Ini akan semakin kami matangkan mengingat berdasarkan survey Kemenhub, tahun ini akan ada 128,3 juta orang yang mudik," ujar Firman dikutip dalam laman resmi NTMC Polri, Kamis (16/3).

Firman menambahkan, terdapat dua hal prioritas dalam mengamankan arus mudik lebaran kali ini. Yakni, mengenaiantisipasi kemacetan hingga pencegahan kecelakaan lalu lintas. "Jadi, antisipasi kerawanan, titiknya di mana, jumlah Posko, ketersediaan anggota, sangat kami pikirkan dengan berkoordinasi bersama stakeholder terkait," katanya.

Diketahui, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memprediksi sebanyak 123 juta orang akan melakukan mudik Lebaran 2023.

Adapun, dari operator kapal penyeberangan dan PO bus menyatakan kesiapannya untuk menghadapi

angkutan Lebaran 2023.

Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Ira Pupadewi menyampaikan pada angkutan Lebaran tahun ini perusahaan menyiapkan 51 dermaga dan 225 armada kapal yang akan dioperasikan di 8 lintasan di 9 cabang.

"Ini ada lintasan paling favorit adalah Bakauheni-Merak, Ketapang-Gilimanuk, Sulawesi-Kalimantan dan Sumatera, lalu Ajibata-Ambarita di Danau Toba juga itu masuk," ujar Ira dalam diskusi Forwuh bertajuk "Kesiapan Operator Transportasi Hadapi Mudik Pascapandemi", di Jakarta, Rabu (15/3) kemarin. • lus



FOTO: ANTARA

BPOM UNKAP PABRIK KOSMETIK ILEGAL BERBAHAYA

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Peni Kusumastuti Lukito (tengah) dan jajarannya menunjukkan bahan dan kosmetik ilegal berbahaya dalam konferensi pers penggerebekan pabrik di kompleks pergudangan Elang Laut, Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta, Kamis (16/3). BPOM menyegel pabrik kosmetik dan menyita alat produksi, bahan kimia, serta produk-produk mereka senilai Rp7,7 miliar karena tidak memiliki izin edar dan menggunakan bahan berbahaya.

Bripka Madih Adukan Maladministrasi Penanganan Kasusnya ke Ombudsman

JAKARTA (IM) - Bripka Madih mendatangi Kantor Ombudsman RI untuk melaporkan maladministrasi dan tidak profesionalnya pihak kepolisian dalam menangani kasus yang dilaporkannya.

"Kami melakukan pengaduan terkait penyelidikan dan/atau penyidikan yang menangani perkara dugaan penyerobotan tanah, dan pemukulan atau pengeroyokan yang dialami Bripka Madih," ujar Kuasa Hukum Bripka Madih, Charles Situmorang, di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Kamis (16/3).

Ia menjelaskan, kliennya sudah membuat laporan tentang penyerobotan tanah yang dialaminya pada 2011 ke Polda Metro Jaya. Lalu, pada 2012, ia kembali melapor ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pengeroyokan dan penganiayaan oleh 12 oknum polisi.

Lalu pada 2013, Bripka Madih meminta klarifikasi terkait tindak lanjut penanganan laporannya pada 2011 dan 2012.

"Menurut pandangan kita, ini salah satu (ben-tuk) ketidakprofesionalan

karena sudah 11-12 tahun berlalu untuk penanganan (laporan) tersebut," ungkap Charles.

Untuk laporan terkait pengeroyokan yang dialami Bripka Madih, hingga saat ini masih belum menemui titik terang. Padahal, pada saat itu Bripka Madih sudah melampirkan barang bukti berupa pakaian yang masih memiliki bercak darah. Ia pun sempat divisum.

"Barang bukti bajunya berdarah dan sudah divisum. Sampai hari ini kurang kejelasan laporan tersebut. Nah, ini yang kami anggap sebagai bagian dari pada ketidakprofesionalan dan maladministrasi," tutur Charles.

Charles berharap, dengan pengaduan yang dilakukan oleh Bripka Madih ke Ombudsman RI, kliennya mendapat kejelasan terkait seluruh laporan itu.

"Mudah-mudahan mendapat perlindungan hukum, lalu tindak lanjut laporan-laporan dari 2011. Supaya semua laporan ditindaklanjuti dan (proses) berjalan dengan baik," ujarnya. • lus